



Vaksin Corona Rp200.000 per Dosis

JAKARTA—Vaksin Covid-19 di Indonesia akan dijual dengan harga Rp200.000.

*Luqas Subarkah & Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com*

PT Bio Farma (Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan vaksin mengungkapkan harga vaksin Covid-19 yang dijual tidak akan memberatkan pemerintah.

"Kisaran harganya Rp200.000," ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/10).



► Bio Farma berkomitmen mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19

► BPOM menyambangi Sinovac di China untuk visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin Corona.

Ia juga menjelaskan tentang kabar yang menyatakan jika Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brasil. Negara ini dikabarkan akan menjual vaksin seharga US\$1,96 (sekitar Rp29.000) per dosis.

► Halaman 10

Vaksin Corona...

Honesti Basyir menyampaikan, kabar tersebut sudah dibantah pihak Sinovac, melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma. Informasi harga vaksin Covid-19 di Brasil, telah kami klarifikasi ke Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak US\$90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat, dan mengenai harga US\$1,96 per dosis pun tidak tepat," katanya.

Ia menjelaskan biaya pengiriman tiap dosis saja sekitar US\$2. Sinovac sedang menelusuri asal informasi soal harga vaksin tersebut.

"Ininya, Bio Farma berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia," ujar Honesti.

Dalam surat resmi yang disampaikan Sinovac, ada beberapa faktor dalam menentukan harga vaksin Covid-19. Salah satunya adalah pada investasi studi klinis fase tiga terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. "Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin Covid-19 tidak dapat disamakan," jelas dia.

Untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid-19 mulai dari bahan baku dan lainnya, ia mengemukakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan terbang ke Sinovac China untuk visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin Corona di fasilitas Sinovac di Beijing, China, termasuk LP POM MUI untuk melaksanakan audit halal.

BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)/Good Manufacturing Practice (GMP).

Saat ini, uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 masih berjalan di pekan kedua Oktober 2020 ini. Data terakhir menunjukkan sampai dengan 9 Oktober 2020, 843 sukarelawan yang sudah menjalani penyuntikan kedua, dan 449 sukarelawan dalam tahap pengambilan darah pasca-penyuntikan kedua/masuk periode *monitoring*. "Hingga saat ini uji klinis tahap tiga berjalan lancar dan belum ada dilaporkan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPi) serius akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19," katanya.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, mengatakan delegasi MUI akan menuju China untuk

mengecek kehalalan terhadap berbagai hal terkait dengan vaksin Covid-19. Ia mengatakan MUI berencana ke China pada Rabu (14/10) hari ini 2020 untuk melakukan audit kehalalan vaksin tersebut. Biofarma sebagai BUMN farmasi di Indonesia sudah mendaftarkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 Sinovac, dari China.

Biofarma menjalin kemitraan dengan China untuk pengembangan vaksin Sinovac tersebut. Pemerintah juga mengembangkan berbagai vaksin buatan dalam negeri dan juga pengembangan bermitra dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI nonaktif, mengatakan vaksin Covid-19 sebaiknya halal. Sementara jika pada kenyataannya tidak halal, maka bukan menjadi persoalan untuk digunakan untuk ada unsur darurat akibat pandemi virus Corona jenis baru SARS-CoV-2.

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan Ma'ruf menegaskan kehalalan vaksin bukan persoalan utama yang akan mempersulit pendistribusian vaksin Covid-19 dari China. "Jadi ini tidak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan Wakil Presiden, maka jangan ada anggapan proses untuk kehalalan vaksin itu akan menghambat, karena itu sama sekali tidak menghambat," kata dia.

Pasien Sembuh

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 38 penambahan kasus positif pada Selasa. Kabupaten Sleman mendominasi penambahan ini sebanyak 14 kasus. Sebanyak 39 kasus dinyatakan sembuh dan satu kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisilinya meliputi Kota Jogja (11 kasus), Bantul (sembilan kasus), Gunungkidul (empat kasus), dan Sleman (14 kasus).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan terdiri dari *tracing* kasus positif 18 kasus, *screening* karyawan kesehatan (dua kasus), periksa mandiri (satu kasus), perjalanan luar daerah (satu kasus), dan dalam penelusuran (16 kasus).

"Berdasarkan pemeriksaan pada 640 sampel dari 561 orang," ujarnya. Satu kasus dilaporkan meninggal yakni Kasus 3.118, laki-laki, 58, warga Kota Jogja, dengan komorbid diabetes melitus. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisilinya meliputi Bantul (dua kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman (36 kasus).

Dengan penambahan ini, total

kasus positif DIY menjadi sebanyak 3.145 kasus, dengan 2.396 kasus sembuh dan 81 kasus meninggal. Sementara penggunaan *bed* di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 28 *bed* dan nonkritikal 161 *bed*.

Izin Pembukaan

Satgas Covid-19 Sleman akhirnya memutuskan agar manajemen perusahaan pengelola layanan *call center* salah satu operator yang berkantor di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, memperbaiki penerapan protokol kesehatan (prokes) dan dibolehkan tetap beroperasi. Permintaan ini dilakukan menyusul adanya temuan 62 kasus positif Covid-19 di perusahaan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo mengatakan sesuai bertemu dengan perwakilan perusahaan, diputuskan agar manajemen diminta untuk memperketat penerapan prokes. Dinkes juga meminta agar manajemen membatasi pelayanan dan pembatasan kapasitas ruangan. Tujuannya untuk memastikan jaga jarak bisa diterapkan.

Kegiatan tersebut harus dilakukan pihak manajemen selama tiga hari untuk dilakukan sterilisasi di gedung tersebut. Sayangnya tidak dijelaskan bentuk sterilisasi yang dilakukan seperti apa. Hingga kini, kata Joko, tercatat masih 62 karyawan di perusahaan tersebut yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah tersebut didasarkan hasil *rapid test* yang dilakukan manajemen terhadap 675 karyawan baik di lantai dua maupun di lantai tiga.

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto dalam laporan tertulisnya menyebutkan adanya temuan penerapan prokes yang tidak sesuai ketentuan di perusahaan tersebut.

Prokes yang belum dilaksanakan, misalnya, pengukuran suhu yang seharusnya dilakukan sejak masuk di pintu gerbang sebelum parkir tidak dilakukan. Di sana juga belum ada ruang isolasi khusus untuk istirahat sementara apabila ditemukan pengunjung atau karyawan dengan suhu diatas 37,3 derajat Celcius. Potensi penularan di ruang telemarket juga dinilai sangat tinggi karena menggunakan AC Central. "Imbauan kami sangat perlu diberlakukan penegakan protokol kesehatan secara ketat di sana," katanya.

Saat mencoba mengonfirmasi persoalan penerapan prokes terkait putusan Satgas Covid-19 Sleman kepada manajemen perusahaan, salah seorang petugas satuan pengamanan (Satpam) perusahaan mengatakan jika manajemen belum bersedia ditemui oleh media. (Detik/Liputan6)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005